BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KPU Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024 melalui strategi komprehensif, termasuk sosialisasi intensif kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, kaum marjinal, dan pedagang. Kolaborasi dengan Kesbangpol dan pemanfaatan media sosial serta tatap muka juga menjadi elemen kunci. Penunjukan KPU Kalimantan Selatan sebagai lokus nasional memberikan dorongan tambahan, dengan penyediaan fasilitas inklusif seperti juru isyarat bagi kelompok tunarungu. Strategi ini membuahkan hasil, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 83,83%, tertinggi dalam sejarah provinsi tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi melalui LSM menambah transparansi dan memastikan kebijakan tepat sasaran. Strategi KPU ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik, kolektivitas, dan pendekatan damai, sebagaimana ditekankan oleh teori partisipasi politik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pendidikan politik dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat secara sukarela dan terorganisir.
2. KPU Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024 berkat sinergi lima faktor pendukung: KPU, pemerintah daerah, masyarakat, partai politik, dan

media. Kolaborasi ini mencakup penyediaan fasilitas, kampanye terbuka, serta penyebaran informasi melalui media. Hasilnya, tingkat partisipasi mencapai 83,83%, menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang tinggi. Namun, KPU menghadapi hambatan, terutama keterbatasan anggaran, yang diatasi dengan strategi kreatif, seperti pemberian suvenir untuk menarik minat masyarakat. Faktor penghambat lain, seperti praktik politik uang yang memengaruhi pemilih tradisional, tetap menjadi tantangan. Meski demikian, kesadaran politik aktif masyarakat Kalimantan Selatan tercermin dari tingginya partisipasi dan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi KPU dalam menciptakan pemilih berdaulat dan meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah tersebut.

B. Saran

1. KPU Provinsi Kalimantan Selatan tetap meningkatkan strategi partisipasi politik masyarakat, baik menjelang kampanye maupun pada masa kampanye dengan strategi-strategi baru.
2. KPU Provinsi Kalimantan Selatan dapat bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pemberantasan *money politics* agar meminimalisir partisipasi politik masyarakat karena adanya pengaruh *money politics*.
3. Masyarakat selaku partisipan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politiknya dan menolak *money politics* sebagai bentuk kesukarelaan mengikuti pesta demokrasi.